

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kabupaten Jombang

Bayu Rafligo Diazmuda¹, Tukiman²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹diazmuda@gmail.com, ²tukiman_upnjatim@yahoo.com

ABSTRACT

Jombang Regency is one of the regencies in East Java that experiences flooding every year. BPBD as a stakeholder responsible for disaster management efforts has taken a number of steps/efforts to reduce the impact of floods. This research aims to analyse and describe the problem of the role of the Regional Disaster Management Agency in flood disaster prevention in Jombang Regency. Descriptive qualitative research method was used in this research. Primary data sources and secondary data were used in this research. Data collection techniques through documentation, interviews and observation. This study uses the theory of the disaster management cycle according to (Khambali, 2017) which focuses on the pre-disaster stage which has 4 indicators including prevention, disaster mitigation, preparedness, and early warning. The results showed that BPBD Jombang Regency has played a role in preventing flood disasters in Jombang Regency. This is evidenced by establishing a Pusdalops, installing disaster signs, forming Disaster Resilient Villages, providing disaster counseling, coordinating with Regional Apparatus Organizations (OPD) and related parties in flood disaster prevention, preparing evacuation sites, socializing regulations/guidelines on disaster management, and providing good early warning. However, in the contingency plan indicator, it was found that BPBD has not yet developed a contingency plan because it is still in the process of being developed.

Keywords: Floods, Role, Disaster Prevention

ABSTRAK

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang mengalami kejadian banjir di setiap tahunnya. BPBD menjadi stakeholder yang bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan bencana telah mengambil sejumlah langkah/upaya untuk mengurangi dampak bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Jombang. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori siklus penanggulangan bencana menurut (Khambali, 2017) yang berfokus pada tahap prabencana yang memiliki 4 indikator meliputi pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Jombang sudah berperan dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan Pusdalops, memasang rambu-rambu kebencanaan, membentuk Desa Tangguh Bencana, memberikan penyuluhan tentang

kebencanaan, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait dalam pencegahan bencana banjir, menyiapkan lokasi evakuasi, melakukan sosialisasi peraturan/ pedoman tentang penanggulangan bencana, serta pemberian peringatan dini yang baik. Namun, dalam indikator rencana kontinjensi ditemukan bahwa BPBD masih belum menyusun rencana kontinjensi karena masih dalam proses penyusunan.

Kata kunci: Bencana Banjir; Peran; Pencegahan Bencana

PENDAHULUAN

Salah satu negara yang rentan terhadap bencana alam adalah Indonesia. Tanggung jawab pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana ditunjukkan dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkena dampak bencana.

Sebuah organisasi yang disebut BPBD didedikasikan untuk menangani masalah-masalah terkait bencana yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Karena BPBD ditugaskan untuk mengelola urusan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai unsur pelaksana program penanggulangan bencana di daerah, BPBD merupakan unsur pelaksana untuk pelaksanaan program tersebut.

Kabupaten Jombang di Jawa Timur sering mengalami banjir setiap tahun. Banjir di Kabupaten Jombang umumnya terjadi saat musim hujan. Curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan sungai meluap dan tanggul jebol karena terlalu banyaknya air masuk, menjadi penyebab banjir di Kabupaten Jombang.

Dalam rangka menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Jombang, BPBD Kabupaten Jombang sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Jombang telah melakukan banyak langkah. BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa inisiatif, antara lain pemasangan sistem peringatan dini (EWS) dan rambu-rambu bencana.

Namun pada kenyataannya, beberapa orang percaya bahwa inisiatif penanggulangan bencana BPBD tidaklah penting karena mereka tidak menyadari betapa tidak dapat diprediksinya bencana dan bagaimana setiap orang dapat terkena dampaknya. Ketika bencana terjadi, akan ada kerugian baik materi maupun non-materi karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab tentang pentingnya inisiatif penanggulangan bencana.

Agar operasi penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan dengan baik, BPBD Kabupaten Jombang harus menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai tupoksinya. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaannya karena masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mencegah bencana banjir dan mengurangi dampaknya. Mengingat, bukan hanya tanggungjawab dari BPBD saja, namun memerlukan peran serta dari semua pihak.

TINJAUAN LITERATUR

Peran

Miftah Thoha menjelaskan sebagaimana dikutip oleh (Nirwana et al., 2017), Peran adalah bagian variabel dari status seseorang dimana seseorang memenuhi peran ketika dia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Agustina menyatakan bahwa status seseorang dalam struktur sosial, beserta hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya, dikutip dalam jurnal (Prayudi et al., 2019).

Peran berfungsi sebagai aspek yang dapat diubah dari status (kedudukan). Seseorang memenuhi tugasnya ketika ia menjalankan tanggung jawab dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Karena tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran, maka peran dan kedudukan saling berkaitan secara langsung (Soerjono Soekanto, 2013).

Peran Pemerintah Daerah

Menurut (M. Khoiron Mahbubi, 2017) peran pemerintah daerah (pemda) mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini juga mencakup hak, wewenang, dan tanggung jawab pemda untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan memaksimalkan otonomi daerah, daya saing daerah harus ditingkatkan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta nilai-nilai demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan. Hubungan antara struktur pemerintahan dengan pemerintahan daerah lainnya, serta potensi dan keanekaragaman daerah, semuanya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah.

Bencana

Bencana, menurut Safri (2016), adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang berpotensi menimbulkan penderitaan pada manusia, kerusakan harta benda, kerugian lingkungan, prasarana dan sarana, serta berdampak pada tata kehidupan masyarakat. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, tsunami, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi karena letak geografisnya.

Selain itu, bencana alam didefinisikan oleh (Khambali, 2017) sebagai pertemuan antara aktivitas fisik, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, dan aktivitas manusia. Kerugian terhadap ekonomi dan struktur diakibatkan oleh ketidakberdayaan manusia yang disebabkan oleh perencanaan dan manajemen darurat yang tidak memadai.

Bencana Banjir

Menurut Wahyu, dikutip dalam (Awaliyah Nike ; Sarjanti Esti ; Suwarno., 2014), menyatakan bahwa banjir adalah hasil dari air yang meluap ke daratan. Banjir dapat disebabkan oleh sungai yang meluap ke daerah sekitarnya dan limpasan permukaan yang berlebihan yang dikombinasikan dengan curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan.

Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan drainase yang memadai, sehingga menenggelamkan daerah yang tidak diinginkan. Transportasi banjir mempengaruhi daerah dataran rendah karena sistem drainase yang ada dapat gagal dan mengakibatkan banjir (Khambali, 2017).

Manajemen Penanggulangan Bencana

Tujuan dari manajemen penanggulangan bencana, menurut (Usiono et al., 2018), adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kerugian dan bahaya, memastikan para korban menerima bantuan dengan cepat dan tepat, dan memfasilitasi pemulihan yang cepat dan efisien. Proses berkelanjutan di mana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana, merespons dan bertindak cepat selama bencana, dan mengambil tindakan setelah bencana terjadi disebut sebagai siklus manajemen bencana. Terdapat siklus manajemen bencana yang menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam setiap fase manajemen bencana dan digunakan dalam upaya-upaya tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan siklus berikut ini:



Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

Sumber: Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (Edisi Kedua), BNPB 2011

Dari gambar tersebut diatas, menurut (Khambali, 2017) mengkategorikan siklus penanggulangan bencana menjadi 3 tahap, antara lain:

1. Pra bencana: Pencegahan melibatkan tingkat kesiapsiagaan menengah dan lebih terarah.
2. Bencana: Ketika terjadi insiden atau krisis, merespons keadaan darurat lebih diutamakan daripada semua tugas lainnya.
3. Pasca bencana: Langkah yang paling penting setelah bencana adalah pemulihan dan rekonstruksi.

Selain itu, kegiatan manajemen penanggulangan bencana terdiri dari hal-hal berikut (Khambali, 2017):

1. Pencegahan

Tujuan dari pencegahan adalah untuk mencegah bencana dengan menghilangkan bahaya jika memungkinkan. Membuat pos peringatan bencana dan membiasakan hidup tertib dan disiplin adalah dua contoh upaya pencegahan bencana.

2. Mitigasi Bencana

Menanggapi ancaman bencana, mitigasi bencana mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak bencana dan untuk menurunkan risiko bencana melalui pembangunan fisik, kesadaran, dan peningkatan kapasitas. Penyuluhan dan pembentukan tim penanggulangan bencana merupakan contoh tindakan mitigasi bencana.

3. Kesiapsiagaan

Serangkaian tindakan yang diambil untuk bersiap dalam keadaan bencana melalui perencanaan dan penerapan langkah-langkah yang masuk akal dan praktis dikenal sebagai kesiapsiagaan. Misalnya, membuat pos komando, rencana kontinjensi, penyiapan sarana komunikasi, sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana, dan penyiapan lokasi evakuasi.

4. Peringatan Dini

Tujuan dari peringatan dini yakni, untuk memberi indikasi bahwa bencana mungkin akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus memenuhi 4 syarat antara lain bersifat resmi, segera, tegas tidak membingungkan, dan menjangkau masyarakat.

Penelitian ini akan berfokus pada fase pra-bencana, di mana peneliti akan membahas lebih dalam mengenai pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peringatan dini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Barlian, 2016) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian ditujukan untuk menyelidiki fenomena seperti motivasi, persepsi, tindakan, perilaku, dan lain-lain yang dihadapi oleh partisipan penelitian secara kolektif. Fokus dari penelitian ini adalah penanggulangan bencana banjir pada tahap prabencana dari siklus penanggulangan bencana menurut (Khambali, 2017) yang terdiri atas pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini. Karena BPBD Kabupaten Jombang memiliki kewenangan khusus dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan banjir, yang menjadi subjek penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian. Selain itu, fakta bahwa banjir masih terus terjadi di Kabupaten Jombang merupakan alasan lain mengapa peneliti memilihnya sebagai lokasi penelitian.

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Supervisor Pusat Pengendalian Operasi merupakan sumber data primer, dengan total tiga orang narasumber. Dengan bantuan media cetak dan online yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini, sumber data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, tinjauan literatur, dan arsip-arsip tambahan.

Penelitian ini dilakukan antara bulan Mei 2023 dan September 2023. Teknik observasi, wawancara narasumber yang telah diatur sebelumnya, dokumentasi selama pelaksanaan, dan prosedur penelitian digunakan untuk mengumpulkan data oleh peneliti.

(Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* merupakan pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memilih uji *credibility*. Kesesuaian metode pengumpulan data peneliti melalui wawancara menjadi pertimbangan ketika memilih pendekatan uji ini. Hal ini dikonfirmasi oleh observasi dan didukung lebih lanjut oleh dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena-fenomena yang ditemukan selama pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diuraikan di bawah ini. Penulis menggunakan teori Siklus Penanggulangan Bencana menurut (Khambali, 2017) untuk mengetahui, menguraikan, dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Jombang.

Pencegahan

1) Membuat Pos Peringatan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang membentuk Pusat Pengendalian Operasi sebagai bagian dari upaya pencegahan, yang mencakup pembentukan pos peringatan bencana (Pusdalops). Tanggung jawab Pusdalops meliputi operasi penanggulangan bencana dan pengolahan, penyajian, dan pencarian data. Menurut (Khambali, 2017), pos inilah yang menentukan apakah masyarakat diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya atau tidak. Karena Pusdalops memiliki informasi tersebut, maka Pusdalops dapat menentukan apakah bencana akan berdampak pada suatu daerah atau tidak. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mendirikan pos peringatan bencana melalui Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan tugasnya dengan baik dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Jombang.

2) Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam membiasakan hidup tertib dan disiplin adalah dengan melakukan pemasangan rambu-rambu bencana. Rambu-rambu bencana tersebut memuat peringatan mengajak untuk menjaga lingkungan dengan melarang membuang sampah sembarangan. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan hidup. Tidak hanya itu, ada juga rambu-rambu bencana yang memuat informasi bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana.

Menegakkan aturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan adalah definisi dari membiasakan diri untuk hidup tertib dan disiplin (Khambali, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat setidaknya telah berkontribusi dalam pelestarian lingkungan selama semua orang mematuhi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Wulandari & Nurhantoro, 2019) yang menyatakan bahwa pemasangan

rambu dan papan informasi bencana di kawasan rawan bencana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.



Gambar 2. Rambu Bencana Rawan Banjir
Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, upaya pencegahan dapat dikatakan sudah baik karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sudah mendirikan pos peringatan bencana melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan membiasakan hidup tertib dan disiplin melalui pemasangan rambu-rambu.

Mitigasi Bencana

1) Membentuk Tim Penanggulangan Bencana

Tim penanggulangan bencana dibentuk untuk memitigasi bencana. Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) perlu dibentuk bersamaan dengan Desa Tangguh Bencana. Selain itu, dalam Desa Tangguh Bencana, BPBD juga melakukan pelatihan kebencanaan.



Gambar 3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

Peraturan perundang-undangan, pelatihan, dan lain-lain adalah beberapa bentuk mitigasi non-struktural, menurut (Khambali, 2017). Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan upaya mitigasi bencana dengan baik dengan membentuk tim penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana.

2) Memberikan Penyuluhan-Penyuluhan

Dalam mitigasi bencana dengan kajian memberikan penyuluhan-penyuluhan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang melakukan penyuluhan di desa, sekolah, pemerintah, kodim, polres, dan lain-lain. Kemudian pada akhir tahun, BPBD melakukan penyuluhan/sosialisasi dan simulasi besar dengan relawan-relawan yang ada di Kabupaten Jombang. Tujuan dilakukannya penyuluhan tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.



Gambar 4. Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

(Khambali, 2017) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelatihan digunakan untuk melaksanakan mitigasi nonstruktural. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa BPBD Kabupaten Jombang telah berkontribusi positif dalam upaya mitigasi bencana dengan memberikan penyuluhan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BPBD telah melakukan upaya mitigasi bencana dengan baik melalui pembentukan desa tangguh bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui penyuluhan/sosialisasi, serta melakukan simulasi skala besar dengan baik.

Kesiapsiagaan

1) Penyiapan Sarana Komunikasi

Dalam kesiapsiagaan melalui pemeriksaan kesiapan fasilitas komunikasi. BPBD Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan

Permukiman, dan instansi lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir. Koordinasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali.



Gambar 5. Strategi Penanganan Bencana Melalui Mitigasi Risiko di Kabupaten Jombang

Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

Komunikasi, menurut Cook dan Hunsaker (2007) dalam (Syarif et al., 2014), bertujuan untuk berbagi informasi, memenuhi kebutuhan sosial, dan meningkatkan koordinasi. Hasilnya, komunikasi organisasi yang efektif dan efisien dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Karena BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, maka hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando, dan pengendalian. Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berperan dengan baik dalam penyediaan sarana komunikasi.

2) Membuat Pos Komando

Dalam kesiapsiagaan dengan kajian membuat pos komando. Pos komando akan dibentuk pada saat terjadi bencana yaitu pada masa tanggap darurat baik itu di siaga darurat, masa tanggap darurat, ataupun transisi dari darurat ke pemulihan. Apabila tidak terjadi bencana, pos komando hanya terdapat di Pusat Pengendalian Operasi.

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pasal 3 Ayat 1 yang menjelaskan, penanganan darurat bencana dilakukan melalui penggunaan sistem komando penanganan darurat bencana, yang diaktifkan berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang akan membentuk pos komando pada saat terjadi bencana. Apabila tidak terjadi bencana, pos komando hanya di Pusat Pengendalian Operasi.

3) Penyiapan Lokasi Evakuasi

Dalam kesiapsiagaan dengan kajian penyiapan lokasi evakuasi. Penyiapan lokasi evakuasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang harus terlebih dahulu melakukan observasi dan mitigasi daerah-daerah dengan kemungkinan terkecil ada bencana. Kemudian, pemilihan lokasi evakuasi juga harus aman dari bencana itu sendiri dan bencana ikutannya, nyaman, serta mudah dijangkau. BPBD juga memasang rambu bencana jalur evakuasi dan titik kumpul untuk memudahkan masyarakat dalam menuju lokasi evakuasi.



Gambar 6. Rambu Bencana Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

Menurut Juliana yang dikutip (Safii et al., 2020) Salah satu upaya antisipatif yang bisa dilakukan saat sebelum terjadinya bencana adalah dengan mengidentifikasi lokasi evakuasi atau titik pemberhentian bantuan bencana dan mendistribusikannya kepada masyarakat guna memperlancar proses evakuasi korban bencana alam agar dapat meminimalisir kerugian dari bencana tersebut. Sesuai dengan pernyataan tersebut, dalam penyiapan lokasi evakuasi BPBD melakukan observasi terlebih dahulu dan mitigasi daerah kemudian memilih lokasi evakuasi. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berperan dengan baik dalam penyiapan lokasi evakuasi.

4) Rencana Kontinjensi

Dalam kesiapsiagaan dengan kajian rencana kontinjensi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang belum menyusun rencana kontinjensi. Dikarenakan di Kabupaten Jombang terdapat 8 ancaman bencana, BPBD perlu menyusun 8 rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi harus segera disusun untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam merespon kejadian bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pernyataan (Maarif, 2012) yang dikutip oleh (Apriliani & Widana, 2019) belajar dari konsep penanggulangan bencana di masa lalu, dimana penanggulangan bencana yang terfokus pada respon tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka rencana darurat atau rencana kontinjensi harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mendukung pelaksanaan operasional penanggulangan bencana.

5) Melakukan Sosialisasi Peraturan/Pedoman tentang Penanggulangan Bencana

Dalam kesiapsiagaan dengan kajian rencana melakukan sosialisasi peraturan/pedoman tentang penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Jombang sudah melakukan sosialisasi tersebut. Tujuan dari adanya sosialisasi peraturan/pedoman tentang penanggulangan bencana ini agar masyarakat mempunyai wawasan dan pengetahuan bagaimana cara mencegah bencana banjir di Kabupaten Jombang serta dapat meminimalisir dampak bencana banjir. Sosialisasi peraturan/pedoman tentang penanggulangan bencana ini dilaksanakan di sekolah, kodim, polres, pondok dan klinik terkait dengan penanggulangan bencana.



Gambar 7. Pelatihan Mitigasi Bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

Menurut (Pahleviannur, 2019) Sosialisasi dengan tujuan mengedukasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana. Hal ini sejalan dengan kegiatan BNPB yang menekankan pentingnya sosialisasi kesadaran bencana dalam mengurangi dampak bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, upaya kesiapsiagaan yang dilakukan dengan penyiapan sarana komunikasi melalui koordinasi dengan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir, pembuatan pos komando saat terjadi bencana, penyiapan lokasi evakuasi, dan melakukan sosialisasi peraturan/pedoman tentang penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Jombang dapat dinyatakan berperan dengan baik. Namun, BPBD Kabupaten Jombang belum menyusun rencana kontinjensi. Oleh karena itu BPBD Kabupaten Jombang masih perlu menyusun rencana kontinjensi.

Peringatan Dini

Dalam upaya peringatan dini yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang adalah dengan memasang alat yang bernama *Early Warning System* (EWS). EWS ini dipasang di Sungai Marmoyo dan Sungai Gunting. Ketika debit air mencapai batas maksimal, alat ini akan berbunyi dan mengirimkan sinyal ke BPBD Kabupaten Jombang.



Gambar 8. Pelatihan Mitigasi Bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Jombang, 2023

1) Menjangkau Masyarakat

Dalam peringatan dini dengan kajian menjangkau masyarakat. *Early Warning System* (EWS) yang dipasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang akan mengirim sinyal ke BPBD, selanjutnya BPBD akan membagikan informasi tersebut melalui grup whatsapp yang terdiri dari anggota Desa Tangguh Bencana dan perangkat desa terdampak bencana. Setelah BPBD membagikan informasi melalui grup whatsapp, diharapkan anggota yang ada di grup juga membagikan informasi ke masyarakat yang terdampak bencana.

2) Segera

Dalam peringatan dini dengan kajian menjangkau masyarakat. *Early Warning System* (EWS) yang dipasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sudah memenuhi syarat segera. Hal ini dapat diketahui dari cara kerja EWS yang akan memberikan alarm ketika debit air sudah melewati batas dan mengirim

informasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Kemudian, informasi tersebut disebarluaskan oleh BPBD sedini mungkin sebagai peringatan bencana melalui grup whatsapp yang terdiri dari anggota Desa Tangguh Bencana dan perangkat desa terdampak bencana.

3) Tegas Tidak Membingungkan

Dalam peringatan dini dengan kajian tegas tidak membingungkan. *Early Warning System* (EWS) yang dipasang oleh BPBD Kabupaten Jombang sudah memenuhi syarat tegas dan tidak membingungkan karena EWS terhubung langsung ke BPBD dan saat EWS berfungsi, EWS akan memberikan sinyal. Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang akan menyampaikan informasi yang padat, jelas, dan lengkap ke masyarakat melalui grup whatsapp. Tujuan pemberian informasi yang padat jelas dan lengkap adalah agar masyarakat mudah memahami informasi yang disebarluaskan oleh BPBD Kabupaten Jombang.

4) Bersifat Resmi

Dalam peringatan dini dengan kajian bersifat resmi. Penyampaian informasi kebencanaan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Jombang adalah melalui grup whatsapp. Oleh sebab itu, sudah dapat dikatakan bahwa pemberian peringatan dini bersifat resmi karena langsung dari BPBD Kabupaten Jombang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, upaya pemberian peringatan dini yang dilakukan melalui pemberian informasi yang bersifat resmi, menjangkau masyarakat, tegas tidak membingungkan dan, segera oleh BPBD Kabupaten Jombang dapat dikatakan berperan dengan baik sebab dalam pelaksanaannya mampu memberikan peringatan dini melalui pemasangan alat *Early Warning System* (EWS) dan dalam publikasi ke masyarakat melalui grup whatsapp yang terdiri dari anggota Desa Tangguh Bencana dan perangkat desa yang terdampak bencana, serta diharapkan dapat disebarluaskan lagi ke masyarakat yang terdampak bencana banjir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari masing-masing fokus tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kabupaten Jombang sudah berperan karena dalam upaya pencegahan dengan mendirikan pos peringatan bencana melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan membiasakan hidup tertib dan disiplin melalui pemasangan rambu-rambu. Upaya mitigasi bencana dengan membentuk tim penanggulangan bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana dan memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui penyuluhan/sosialisasi dan simulasi besar. Upaya kesiapsiagaan dengan penyiapan sarana komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penanggulangan bencana banjir, pembuatan pos komando saat terjadi bencana, penyiapan lokasi evakuasi, dan melakukan sosialisasi peraturan/pedoman tentang

penanggulangan bencana. Upaya peringatan dini dengan memasang alat *Early Warning System* (EWS) melalui pemberian informasi yang bersifat resmi, menjangkau masyarakat, tegas tidak membingungkan, dan segera. Akan tetapi masih kurang maksimal karena masih terdapat kekurangan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang belum menyusun rencana kontinjensi. BPBD perlu memaksimalkan penggunaan media sosial untuk publikasi peringatan bencana banjir. BPBD juga perlu meningkatkan kinerja dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah Nike ; Sarjanti Esti ; Suwarno. (2014). Bencana Banjir Di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Nasional: Geoedukasi*, III(2), 92-95.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Khambali. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*.
- M. Khoiron Mahbubi. (2017). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN PULAU MADURA SEBAGAI PULAU GARAM (Studi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumenep)*.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komandi Penanganan Darurat Bencana, (2016).
- Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>
- Safri, H. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 102-112. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.433>
- Soerjono Soekanto, B. S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Syarif, A., Unde, A. A., & Asrul, L. (2014). PENTINGNYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(3), 142-152.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 6 (2024) 2315 - 2330 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i6.1048

Usiono, Utami, T. N., Nasution, F., & Nanda, M. (2018). Disaster Management: Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan. In *Perdana Publishing* (pp. 1–162).

Wulandari, N., & Nurhantoro, T. S. (2019). Pentingnya Bilingual Safety and Warning Bagi Daerah Rawan Bencana. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 1 (September 2018), 274–280.
<http://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/10>